

Nomor : B/ 216 /AA.05/2023
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

27 November 2023

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kota Dumai
di
Dumai

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada **Kota Dumai**, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kota Dumai. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Kota Dumai telah menindaklanjuti **sebagian** rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kota Dumai dan sebagian perangkat daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi yang telah disusun;
- b. Menyusun SOP pengumpulan data kinerja pada tingkat perangkat daerah.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kota Dumai menunjukkan bahwa nilai sebesar **64,99** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Baik**", yaitu **Implementasi SAKIP sudah baik pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai	
			2022	2023
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,71	22,04
b.	Pengukuran Kinerja	30	15,38	15,69
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,16	11,22
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,95	16,04
Nilai Hasil Evaluasi		100	64.20	64.99
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kota Dumai tahun 2023 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Pemerintah Kota Dumai telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja serta dokumen lainnya baik pada tingkat Pemerintah Daerah. Kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan secara umum telah menjawab isu strategis yang ada di Kota Dumai. Rumusan kinerja Pemerintah Daerah yang tertuang dalam tujuan, sasaran dan indikator kinerja secara umum telah berorientasi hasil. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- Masih terdapat dokumen perencanaan kinerja yang belum diformalkan seperti Perjanjian Kinerja dan Dokumen Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Pemerintah Kota Dumai dan sebagian Perangkat Daerah telah menyusun

dokumen penjenjangan kinerja (*cascade down*), namun belum memiliki kualitas yang cukup baik karena masih cenderung berdasarkan hierarki organisasi belum berdasarkan *logical framework*;

- Masih terdapat sasaran strategis yang belum berorientasi pada hasil (*outcome*) dan indikator kinerja yang belum SMART, seperti pada:
 - Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Perdagangan pada sasaran strategis "Meningkatnya akuntabilitas dinas perdagangan" dengan Indikator "persentase penunjang urusan pemerintah bidang perdagangan";
 - Perjanjian kinerja Kepala Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai pada sasaran strategis "Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan profesionalisme sumber daya aparatur".
 - Perjanjian kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai pada sasaran strategis "Meningkatnya jumlah kelompok tani yang dibina dan diberi bantuan" dengan indikator "cakupan bina kelompok tani".
- Penetapan rencana aksi yang disusun pada sebagian Perangkat Daerah belum sepenuhnya menjabarkan aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.
- Masih terdapat penetapan target yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Seperti pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan indikator "Angka kecukupan protein" realisasi tahun 2022 tercapai 59,70 sedangkan pada tahun 2023 hanya ditargetkan 52,75.

2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kota Dumai telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala atas realisasi kinerja dan telah memiliki rencana aksinya untuk pencapaian kinerja. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut telah disusun Indikator Kinerja Utama di level Pemerintah daerah dan Perangkat daerah.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut:

- Masih terdapat dokumen Indikator Kinerja Utama yang tidak dilengkapi dengan formulasi perhitungan dan sumber data yang jelas;
- Belum memanfaatkan aplikasi e-sakip sebagai monitoring dan evaluasi kinerja, sehingga pemantauan kinerja masih dilakukan secara manual;
- Pemerintah Daerah Kota Dumai telah melakukan pengukuran kinerja,

namun hasilnya belum digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

3) **Pelaporan Kinerja**

Pemerintah Kota Dumai telah menyusun laporan kinerja tahun 2022 baik pada tingkat pemerintah daerah maupun pada tingkat perangkat daerah. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi pelaporan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- Laporan kinerja belum dipublikasikan secara umum melalui website resmi oleh Pemerintah Kota Dumai;
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada sebagian Perangkat Daerah belum menyajikan analisis keberhasilan dan kegagalan yang komprehensif terhadap capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai contoh pada Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;

4) **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Inspektorat Pemerintah Kota Dumai telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP kepada perangkat daerah. evaluasi tersebut telah menghasilkan temuan dan rekomendasi atas implementasi SAKIP untuk Perangkat Daerah.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas internal diantaranya sebagai berikut:

- Belum memiliki pedoman evaluasi internal untuk mendukung pelaksanaan implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Dumai;
- Monitoring atas tindak lanjut rekomendasi perangkat daerah belum berjalan optimal, hal ini ditandai dengan masih terdapat perangkat daerah yang belum tepat dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Internal AKIP;
- Laporan hasil evaluasi yang dilakukan belum memberikan rekomendasi yang mendalam untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap Perangkat Daerah.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Mereviu kembali dokumen penjenjangan kinerja (*cascade down*) dengan mengacu pada Permenpan RB No.89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan, agar tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya di level Perangkat Daerah berorientasi pada hasil dan memastikan kecukupannya dalam mengukur keberhasilan tujuan/sasaran strategis tersebut;
- 3) Mereviu kembali rencana aksi yang disusun pada sebagian Perangkat Daerah, dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut;
- 4) Memastikan Indikator Kinerja Utama yang disusun oleh perangkat daerah memuat formulasi perhitungan dan sumber data yang jelas;
- 5) Memanfaatkan aplikasi e-sakip sebagai alat untuk monitoring pencapaian kinerja organisasi setiap Perangkat Daerah sekaligus dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen kinerja lainnya;
- 6) Menerapkan kebijakan reward and punishment dengan memperhitungkan capaian kinerja organisasi;
- 7) Memastikan Laporan Kinerja dipublikasikan melalui *website* resmi Pemerintah Kota Dumai;
- 8) Meningkatkan kualitas laporan kinerja baik di tingkat Pemda maupun Perangkat Daerah, antara lain dengan menyajikan analisis yang komprehensif, menyempurnakan satuan kinerja yang tepat, serta memanfaatkan laporan kinerja sebagai *feedback* dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja;
- 9) Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut perangkat daerah atas laporan hasil evaluasi internal, sehingga dapat memberikan perbaikan dalam implementasi SAKIP internal;
- 10) Menyusun pedoman evaluasi AKIP yang disesuaikan dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021;
- 11) Mendorong pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi AKIP, untuk peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Dumai;
- 12) Meningkatkan kualitas SDM inspektorat agar hasil evaluasi akuntabilitas yang dilakukan dapat memberikan rekomendasi yang cukup dan mendalam untuk perbaikan implementasi akuntabilitas kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Kota Dumai. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Kota Dumai dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

 **Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Riau;
4. Wali Kota Dumai.